

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan perangkat daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pati merencanakan serangkaian strategi yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan Tujuan “Terpenuhinya infrastruktur transportasi bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan”. Sasaran yang dirumuskan untuk mencapai kondisi tersebut adalah : “Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan transportasi yang tertib lancar dan selamat”. Rangkaian Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Tujuan dan Sasaran diatas adalah sebagai berikut;

5.1.1 Strategi Perangkat Daerah Lima Tahun Kedepan

1. Peningkatan kapasitas jalan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.
2. Peningkatan ketersediaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Pengawasan lalu lintas jalan secara berkala .
4. Peningkatan layanan prima perhubungan dengan pemberdayaan sumberdaya yang terampil dan profesional.

5.1.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Lima Tahun Kedepan

1. Menciptakan kondisi lalu lintas pada ruas dan simpul transportasi jalan yang tertib dan lancar.
2. Meningkatkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada titik *crowded* permasalahan lalu lintas jalan.
3. Menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.
4. Menjalin kemitraan dengan *stakeholders* dalam rangka peningkatan kualitas layanan perhubungan.

Sesuai amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor: 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dilakukan pemeriksaan penyelarasan strategi pembangunan. Surat Edaran diatas dikandung maksud bahwa pentingnya relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Relevansi tersebut dapat digambarkan pada tabel 5.1 dibawah ini;

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK			
MISI : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya infrastruktur transportasi bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan transportasi yang tertib lancar dan selamat	1. Peningkatan kapasitas jalan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.	1. Menciptakan kondisi lalu lintas pada ruas dan simpul transportasi jalan yang tertib dan lancar
		2. Peningkatan ketersediaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan	2. Meningkatkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada titik <i>crowded</i> permasalahan lalu lintas jalan
		3. Pengawasan lalu lintas jalan secara berkala	3. Menurunkan angka pelanggaran lalu lintas
		4. Peningkatan layanan prima perhubungan dengan pemberdayaan sumberdaya yang terampil dan profesional	4. Mejalin kemitraan dengan <i>stake holders</i> dalam rangka peningkatan kualitas layanan perhubungan.